



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Muhammin Ajak Pemimpin Dunia Tanggulangi Kemiskinan akibat Covid 19
Tanggal	: Kamis, 18 Februari 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 2

Muhammin Ajak Pemimpin Dunia Tanggulangi Kemiskinan akibat Covid-19

SETAHUN lebih pandemi covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memorak-porandakan perekonomian dunia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhammin Iskandar (Gus AMI) mengatakan para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap memberi makna pandemi ini.

"Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari akibat pandemi covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI, Selasa (16/2).

Dengan mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan dampak pandemi covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang.

Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus pada kemiskinan ekstrem akibat pandemi.

"Jika pemerintah di bawah dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah," kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara terjajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang



sehingga jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih tersebut, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki mencoba untuk bangkit.

"Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32%, pada kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9% hingga 1,1%," tuturnya.

Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni di mana tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan?

Sebagai salah satu pilar demokrasi, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya, yakni merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari kemiskinan.

"Saya mengistilahkan kehadiran partai politik di tengah masyarakat harus mampu melonggar jalan napas kesejahteraan," urainya.

Gus AMI mengatakan peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menejis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan

kesejahteraan. "Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini tidak ada negara miskin kecuali yang tidak terkelola dengan baik," ujarnya.

Menurut mantan menakertrans ini, partai politik bisa menjadi *leader* andal dalam mengkreasi upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

"Karena itu, tak ada kata lain, visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan partai politik," katanya.

Tidak bisa parsial

Menurut Gus AMI, pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.

Karena itu, PKB melalui kader-kadernya di pemerintahan dan parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan parsial dan tambal sulam.

"Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," urainya.

Di masa pandemi, ada tiga hal yang jadi titik tekan per-

juangan politik, yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan. Pertama, pendidikan untuk semua (*education for all*).

Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren ialah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisasi risiko buruk akibat covid-19, yakni terjadinya *lost generation*.

Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tunuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sapai hilir sektor pertanian.

Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UUDesa No 6/2014 dan Dana Isa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomidesaan (*rural economy*) sera masif dengan menempati desa sebagai lokomotif rubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.

Terakhir, ekonomi kerakyatan. Akibat panasi, sektor ini yang palinterkena dampak. Sektor ekonomi kerakyatan yang bagian besar diempati UNM juga terbukti sebagai pempung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.

"Atas dasar itu, saya kira memutus matranti kemiskinan harus mulai dengan memberi da hidup kepada sektor ini. P3 men-desak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Selainnya, negara mengucurk anggaran Rp123,46 trln sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," turnya.
(RO/S3-25)